

**PENGARUH KEJELASAN SASARAN ANGGARAN, PERWUJUDAN NILAI
TRANSPARANSI, PENGENDALIAN AKUNTANSI, AKUNTABILITAS, VALUE FOR
MONEY TERHADAP PENGELOLAAN AKUNTANSI KEUANGAN SEKTOR PUBLIK**

Niken Ayu Saskia*, Moh. Amin, Junaidi*****
Ayun00643@gmail.com

Universitas Islam Malang

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the effect to determine the Linkage of Clarity of Budget Targets, Transparency Value Realization, Accounting Control, Accountability, Value for Money on Management of Public Sector Financial Accounting. Sources of data using primary data and sampling techniques using purposive sampling with a sample of 37 respondents. The results of the Research on Budget Target Clarity, Transparency Value Realization, Accounting Control, Accountability and Value For Money affect the Management of Public Sector Financial Accounting.

Keywords: *Clarity of Budget Goals, Embodiment of Transparency Value, Accounting Control, Accountability, Value For Money and Management of Public Sector Financial Accounting*

PENDAHULUAN

Akuntansi sektor publik merupakan sistem akuntansi yang digunakan oleh lembaga publik sebagai salah satu tanggung jawab terhadap masyarakat. Peran pemerintah sebagai lembaga publik yaitu masyarakat meminta untuk mengelola secara akuntabel, transparan, dan bertanggung jawab dalam memberikan informasi secara terbuka serta mengawasi proses manajemen keuangan yang andal serta adanya manajemen anggaran yang baik. Pengelolaan anggaran juga sangat penting untuk kelangsungan hidup dan perkembangan organisasi karena erat kaitannya dengan kelangsungan hidup masyarakat (Pertiwi 2015:2).

Dengan era perkembangan zaman, sektor publik yang ada di Indonesia saat ini muncul tuntutan terkait penggunaan informasi keuangan di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, tuntutan tersebut yaitu perlunya transparansi bagi publik maupun pemerintah, pemberian informasi kepada publik yang didasarkan pada pemenuhan hak publik. Menurut Sanjaya, dkk., (2014), kurangnya pemerintah dalam menyediakan informasi keuangan untuk saat ini juga menyebabkan akuntabilitas pemerintah daerah dalam bentuk laporan keuangan yang belum sepenuhnya dapat diakses dengan mudah oleh publik.

Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap penyelenggaraan administrasi publik memicu timbulnya gejolak pada ketidakpuasan masyarakat, sehingga tuntutan kinerja instansi sektor publik kini yang semakin meningkat dapat dijadikan pertanggungjawaban pejabat negara atas kepercayaan yang diminta dari mereka. Kinerja lembaga pemerintah kini semakin mendapat perhatian karena orang mulai mempertanyakan manfaat yang mereka peroleh dari layanan lembaga pemerintah. Keluhan dan pengaduan yang terjadi di publik dalam pelayanan

publik baik secara langsung maupun melalui media seperti pengaduan tentang prosedur yang rumit, pelayanan yang tidak bersahabat, ketidakpastian durasi penyelesaian, besarnya biaya yang harus dikeluarkan, persyaratan yang tidak memiliki transparansi yang jelas, dan sikap pejabat atau karyawan yang tidak reseptif terhadap masyarakat dan sektor publik. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pengelolaan keuangan sektor publik, diantaranya kejelasan sasaran anggaran, perwujudan nilai transparansi, pengendalian akuntansi, akuntabilitas, dan *value for money*.

Menurut Mardiasmo (2002) anggaran adalah dokumen antara pemerintah dan DPRD sebagai wakil rakyat, untuk masa depan. Anggaran juga menjadi alat untuk mencegah informasi yang tidak akurat dan disfungsi pemerintah daerah (Bastian, 2001). Dalam pengelolaan akuntansi sektor publik, kejelasan sasaran anggaran diperlukan sebagai manajemen yang baik untuk mencapai kinerja yang diharapkan masyarakat dan untuk menimbulkan tanggungjawab kepada masyarakat. Anggaran menjadi relevan dan penting di kalangan pemerintah karena terkait dengan dampak anggaran terhadap pemerintah, terkait dengan peran pemerintah dalam penyediaan layanan kepada masyarakat.

Pemerintah daerah diwajibkan menyusun laporan pertanggungjawaban dengan menggunakan sistem pengendalian akuntansi yang diatur oleh pemerintah pusat dalam bentuk Peraturan perundang – Undangan Daerah. Dalam rangka melakukan akuntabilitas publik dari pemerintah daerah sebagai pengelola dana publik harus dapat memberikan informasi keuangan yang di perlukan secara akurat, relevan tepat waktu, konsisten, dan dapat dipercaya. Laporan keuangan meliputi laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), untuk itu pemerintah daerah dituntut untuk memiliki sistem informasi akuntansi yang handal dan dapat di percaya. Jika sistem informasi akuntansi yang dimiliki oleh pemerintah daerah tetap lemah, maka kualitas informasi yang dihasilkan oleh sistem tersebut dapat merugikan para pemangku kepentingan terutama dalam hal pengambilan keputusan.

Dalam konteks pemerintah (daerah & pusat) sudah seharusnya segera meningkatkan sistem pengelolaan keuangan daerah, termasuk sistem akuntansi keuangan daerah yang mencakup sistem pelaporan perhitungan anggaran untuk pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel (Abdul Halim, 2002). Menurut Mustofa (2012), “secara umum akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban pertanggungjawabkan dari sebuah keberhasilan atau kegagalan implementasi organisasi dalam mencapai tujuan yang telah diterapkan pada periode sebelumnya yang dilakukan secara berkala. Akuntabilitas di tingkat pemerintah daerah sangat penting karena salah satu bentuk akuntabilitas pemerintah daerah sebagai entitas yang mengelola dana” daerah. Pengelolaan akuntansi yang buruk maka akan merugikan banyak pihak baik masyarakat maupun negara. Sehubungan dengan otonomi daerah, maka diperlukan pengelolaan secara vertikal (kepada pemerintah) maupun secara horizontal (kepada masyarakat daerah) yang baik untuk pengelolaan dana yang disediakan oleh pemerintah pusat. Mengenai akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pemerintah mengeluarkan PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dengan adanya Akuntansi Sektor Publik ini sendiri secara sederhana dapat di artikan sebuah proses mengumpulkan, mencatat, mengklasifikasi, menganalisis, dan melaporkan transaksi keuangan dari suatu organisasi publik yang menyediakan informasi keuangan yang berguna untuk mengambil keputusan yang berfungsi untuk mengendalikan semua transaksi yang terkait dengan kepentingan negara dan masyarakat. Akuntansi membantu pemerintah mengenai penggunaan keuangan negara yang dasarnya merupakan uang rakyat. Informasi keuangan digunakan pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu akuntansi sektor publik sangat penting untuk dipelajari atau dipahami dalam menyusun laporan keuangan pemerintah, karena laporan keuangan pemerintah yang baik yaitu laporan yang disusun dan disajikan sesuai dengan standard akuntansi (SAP) sebagai suatu pedoman dalam membuat keputusan terkait dengan keuangan negara atau daerah.

“Menurut Harun (2009:13) menyatakan bahwa, pemerintah negara mana pun mengumpulkan, mengatur dan menghabiskan jutaan dana dengan tujuan meningkatkan kehidupan masyarakat. Jika pemerintahan tidak secara efisien dan efektif dapat dalam melakukan hal tersebut maka akan menjadi suatu kebocoran dana besar – besaran dalam ekonomi. Pemerintah diberi kepercayaan rakyat untuk mengelola aset dan kewajiban demi kesejahteraan masyarakat di masa depan. Oleh karena itu, masyarakat memiliki hak untuk mengakses informasi yang merupakan dasar tanggung jawab pemerintah untuk penggunaan sumber daya ekonomi publik, pembiayaan operasional, kemampuan pemerintah untuk memenuhi kewajibannya sekarang dan di masa depan.”

Perubahan perkembangan sektor publik ini dilaksanakan melalui kebijakan otonomi daerah dan keseimbangan keuangan pusat dan daerah yang diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang menjelaskan tanggung jawab publik dan administrasi dari pemerintah pusat, provinsi, dan daerah. Kemudian Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 mengatur Keseimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang memberikan dasar hukum untuk desentralisasi fiskal dan menjelaskan pembagian sumber pendapatan baru dan transfer antar pemerintah. Kurangnya profesionalisme petugas pelayanan publik di Indonesia pada organisasi layanan publik membuat kita sadar akan perlunya perhatian khusus untuk melakukan tugas secara langsung dalam layanan publik sehingga masyarakat memperoleh layanan yang baik dengan melakukan keseimbangan antara kekuasaan yang dimiliki dan tanggung jawab yang diberikan kepada masyarakat yang dilayani (Bastian 2006:24).

Dalam hal ini perlu adanya transparansi anggaran kepada masyarakat untuk memudahkan memperoleh informasi, akuntabilitas organisasi sektor publik yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik dan pemerintah. Serta dilakukan pengelolaan laporan keuangan yang baik dan inovasi penganggaran agar praktik korupsi tidak terjadi kembali di

kemudian hari. Maka perlu adanya pengelolaan akuntansi keuangan sektor publik yang baik untuk menghindari seseorang mencari keuntungan pribadi.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang diuraikan di atas, maka peneliti bermaksud melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Perwujudan Nilai Transparansi, Pengendalian Akuntansi, Akuntabilitas, *Value For Money* Terhadap Pengelolaan Akuntansi Keuangan Sektor Publik”**. Rumusan masalah penelitian ialah Bagaimana pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Perwujudan Nilai Transparansi, Pengendalian Akuntansi, Akuntabilitas, *Value for Money* Terhadap Pengelolaan Akuntansi Keuangan Sektor Publik ?

Tujuan penelitian ialah untuk mengetahui kejelasan sasaran anggaran, perwujudan nilai transparansi, pengendalian akuntansi, akuntabilitas, *value for money* terhadap pengelolaan akuntansi keuangan sektor publik.

Kontribusi penelitian:

1. Kontribusi Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada *goal setting theory* atau teori penetapan tujuan yang menekankan pada pentingnya hubungan antara tujuan yang ditetapkan dan kinerja yang dihasilkan oleh Pemerintah Kota Malang.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada *agency theory* yang mana pemerintah bertindak sebagai agen dan masyarakat sebagai prinsipal sehingga pemerintah bisa terorganisir dengan baik dalam meningkatkan kinerjanya dan masyarakat yang menikmati hasilnya.

2. Kontribusi Praktis

a. Bagi Pegawai Pemerintah Kota Malang

Hasil penelitian ini diharap dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi Pemerintah Kota Malang dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kualitas anggaran yang dibuat dan kualitas pelayanan publik dengan. Sehingga anggaran dan pelayanan publik yang dibuat dapat tepat sasaran, dan dapat mencegah tindakan penyelewengan yang dilakukan oleh oknum tertentu yang merugikan lembaga instansi, dengan melakukan hal-hal yang dapat mempengaruhi pengelolaan akuntansi keuangan sektor publik seperti kejelasan sasaran anggaran, perwujudan nilai transparansi, pengendalian akuntansi, akuntabilitas, *value for money*.

b. Bagi Akademik

Memberikan informasi kepada masyarakat selaku *stakeholder* eksternal dan menambah masukan wawasan terutama bagi pengembangan ilmu.

TINJAUAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Goal Setting Theory

Teori penetapan tujuan merupakan salah satu bentuk teori motivasi yang didasari pada premis bahwa seseorang memiliki kebutuhan yang dapat diingat atau dipikirkan sebagai *outcomes* tertentu atau sasaran (*goals*) yang diharapkan dapat dicapai. Penetapan tujuan (*goal setting*) merupakan manajemen penetapan sasaran atau tujuan untuk keberhasilan mencapai kinerja (*performance*). Teori penetapan tujuan menekankan pada pentingnya hubungan antara tujuan yang ditetapkan dan kinerja yang dihasilkan. Konsep dasarnya yaitu seseorang yang mampu memahami tujuan yang diharapkan oleh organisasi, maka pemahaman tersebut akan mempengaruhi perilaku kinerjanya. Terdapat lima prinsip dalam penetapan tujuan yaitu:

- 1) tujuan harus jelas
- 2) tujuan harus mempunyai tingkat kesulitan menengah sampai tinggi
- 3) karyawan harus menerima tujuan itu
- 4) karyawan harus menerima umpan balik mengenai kemajuannya dalam usaha mencapai tujuan tersebut
- 5) tujuan yang ditentukan secara partisipatif lebih baik daripada tujuan yang ditentukan begitu saja.

Agency Theory

Konsep teori agensi adalah hubungan atau kontrak antara prinsipal dan agen. Prinsipal mempekerjakan agen untuk melakukan tugas untuk kepentingan prinsipal, termasuk pendelegasian otorisasi pengambilan keputusan dari prinsipal kepada agen (Anthony dan Govindarajan, 2005). Pada perusahaan yang modalnya terdiri atas saham, pemegang saham bertindak sebagai prinsipal dan CEO (*Chief Executive Officer*) sebagai agen mereka. Pemegang saham mempekerjakan CEO untuk bertindak sesuai dengan kepentingan prinsipal. Teori agensi mengasumsikan bahwa CEO (agen) memiliki lebih banyak informasi daripada prinsipal. Hal ini dikarenakan prinsipal tidak dapat mengamati kegiatan yang dilakukan agen secara terus-menerus dan berkala. Karena prinsipal tidak memiliki informasi yang cukup mengenai kinerja agen, maka prinsipal tidak pernah dapat merasa pasti bagaimana usaha agen memberikan kontribusi pada hasil aktual perusahaan. Situasi inilah yang disebut asimetri informasi. Dalam penelitian ini yang bertindak sebagai prinsipal adalah rakyat dan pemerintah sebagai agen untuk melaksanakan pekerjaan demi kesejahteraan rakyat.

Kejelasan Sasaran Anggaran

Kejelasan sasaran anggaran adalah tujuan agar anggaran yang ditetapkan secara jelas dan spesifik dapat dimengerti oleh orang yang bertanggung-jawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut. Tujuan kejelasan sasaran anggaran memiliki implikasi bagi aparat untuk menyiapkan anggaran sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai lembaga pemerintah. Tujuan anggaran yang tidak jelas akan menyebabkan pelaksana anggaran menjadi bingung, gelisah dan tidak puas dalam bekerja. Hal ini membuat pelaksana anggaran tidak termotivasi untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Organisasi memerlukan anggaran untuk merancang strategi dalam rencana dan sasaran jangka pendek atau jangka panjang. Penganggaran adalah salah satu elemen penting dalam perencanaan sehingga dapat melakukan kontrol pengendalian untuk mencapai tujuan organisasi (Ramandei, 2009: 2).

Perwujudan Nilai Transparansi

Transparansi adalah kebebasan untuk mengakses kegiatan politik, ekonomi pemerintah, dan pengambilan keputusan (Mardiasmo, 2006). Keterbukaan dan transparansi adalah elemen yang penting dari sistem tata kelola perusahaan yang berfungsi dengan baik, pengungkapan perusahaan kepada para pemangku kepentingan adalah cara utama dimana perusahaan dapat menjadi transparan. Transparansi didasarkan pada kebebasan untuk mendapatkan informasi publik yang secara langsung relevan bagi mereka yang membutuhkan. Pernyataan informasi yang transparan kepada pemangku kepentingan memiliki peran penting, antara lain informasi tersebut menjadi salah satu sarana penting bagi *stakeholder* untuk mengawasi operasi organisasi (Siswanto & Aldridge, 2005).

Pengendalian Akuntansi

Pengendalian akuntansi adalah bagian dari sistem pengendalian intern yang berguna untuk mengelola dan mengendalikan catatan atau laporan keuangan umum organisasi. Dengan pengendalian akuntansi laporan keuangan yang dibuat dapat dievaluasi dan diukur kelayakan mereka dan dengan adanya pengendalian akuntansi akan meminimalkan terjadinya kesalahan pencatatan. Pengendalian keuangan yang dikenal dengan pengendalian akuntansi adalah seperangkat kebijakan dan prosedur yang membatasi dan memandu pemrosesan data keuangan dengan tujuan mencegah atau mendeteksi kesalahan dan kecurangan (Carter, 2009:165).

Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk mengirimkan pertanggungjawaban serta menanggapi, menjelaskan kinerja tindakan orang atau badan hukum dan pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau wewenang untuk meminta pertanggungjawaban (Lembaga Administrasi Negara, 2003). Lingkungan yang mempengaruhi akuntabilitas dapat mencakup lingkungan internal dan eksternal yang dapat membentuk, memperkuat atau melemahkan efektivitas tanggungjawab instansi yang dilimpahkan kepadanya .

Value For Money

Menurut Andrianto (2007: 89) *Value for Money* (VFM) adalah konsep penting dalam organisasi sektor publik, *Value for Money* memiliki pengertian “penghargaan terhadap uang”. Hal ini berarti bahwa setiap rupiah harus dihargai secara layak dan digunakan sebaik-baiknya. Menurut Mardiasmo (2002:4) *Value for Money* yaitu konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang didasarkan pada 3 elemen yaitu ekonomis, efisien, dan efektivitas. Inti pengukuran kinerja *value for money* dalam organisasi pemerintah dan sektor publik yaitu kinerja pemerintah tidak dapat dinilai dalam output yang dihasilkan tetapi harus secara terintegrasi mempertimbangkan input, output dan *outcome*.

Pengelolaan Akuntansi Keuangan Sektor Publik

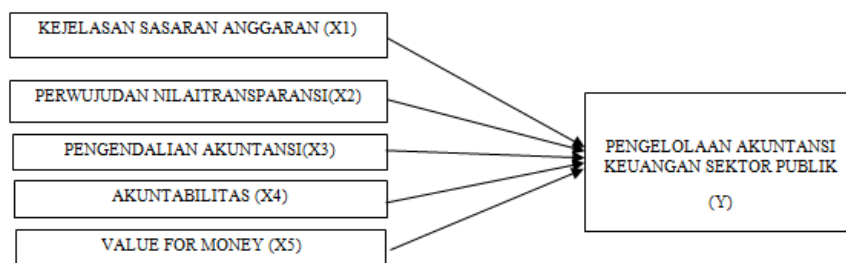
Menurut Bastian (2010:3) akuntansi sektor publik adalah mekanisme teknis dan analisis akuntansi yang diterapkan dalam pengelolaan dana publik di lembaga tinggi negara dan departemen lain seperti pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM dan yayasan sosial, maupun pada proyek kerjasama sektor publik dan swasta. Sedangkan menurut Mardiasmo (2009:11) akuntansi sektor publik terkait erat dengan penerapan dan perlakuan akuntansi dalam

domain publik. Domain publik antara lain yaitu: badan – badan pemerintah (pemerintah pusat dan daerah serta unit kerja pemerintah), perusahaan milik Negara (BUMN, BUMD), dan lembaga swadaya masyarakat (LSM).

Penelitian Terdahulu

Zakiyudin, Suyanto (2015) melakukan penelitian tentang “Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI” data penelitian yang dikumpulkan menggunakan metode survai menggunakan instrumen kuesioner yang ditujukan kepada pejabat struktural. Skor yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan skala likert dengan gradasi dari nilai yang negatif/terkecil hingga nilai yang positif tertinggi dari 1 hingga 5. Sampel diambil sebanyak 131 pejabat struktural dan staf dari populasi sebanyak 208 karyawan yang dibagi secara proporsional pada masing-masing unit pekerjaan/wilayah menggunakan pengambilan *Stratified Sampling*. Analisis data pada penelitian menggunakan analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, sistem pelaporan berpengaruh positif signifikan secara parsial terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan berpengaruh positif signifikan secara simultan terhadap akuntabilitas pemerintah.

Kerangka Konseptual



Gambar 1. Kerangka Konseptual

Hipotesis

- H1 : Terdapat pengaruh dari Kejelasan Sasaran Anggaran, Perwujudan Nilai Transparansi, Pengendalian Internal, Akuntabilitas, Value for Money terhadap Pengelolaan Akuntansi Keuangan Sektor Publik.
- H_{1a} : Terdapat pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Pengelolaan Akuntansi Keuangan Sektor Publik.
- H_{1b} : Terdapat pengaruh Perwujudan Nilai Transparansi terhadap Pengelolaan Akuntansi Keuangan Sektor Publik.
- H_{1c} : Terdapat pengaruh Pengendalian Akuntansi terhadap Pengelolaan Akuntansi Sektor Publik.
- H_{1d} : Terdapat pengaruh Akuntabilitas terhadap Pengelola Akuntansi Keuangan Sektor Publik.

H_{1e} : Terdapat pengaruh *Value For Money* Terhadap Pengelolaan Akutansi Keuangan Sektor Publik.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang menggunakan data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari responden melalui jawaban pertanyaan penelitian. Populasi dalam penelitian ini pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Malang tahun 2020. Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*. Pada penelitian ini yang menjadi sampel yaitu staff Bagian Khususnya staff Badan Keuangan & Aset Daerah (BKAD) di Pemerintahan Kota Malang.

Metode Pengumpulan Data

Sumber data penelitian ini ialah data primer, dengan menyebarkan kuesioner kepada staff Badan Keuangan & Aset Daerah (BKAD) di Pemerintahan Kota Malang. Skala likert ialah instrumen yang dipakai dalam mengukur variabel.

Metode Analisis Data

Metode analisis data yakni analisis regresi linear berganda, dan diolah dengan bantuan aplikasi SPSS 14.0.

Definisi Operasional Variabel

Kejelasan Sasaran Anggaran (X1)

Dengan adanya kejelasan sasaran anggaran, kinerja suatu unit kerja organisasi di nilai baik secara *financial* Menurut (Putra, 2013). Apabila kejelasan sasaran anggaran yang tidak sesuai dan mempunyai sedikit informasi tentang keberhasilan atau kegagalan organisasi dalam mencapai rencana yang telah di tetapkan sebelumnya. Indikator dalam variabel ini berisi tentang :

1. Sasaran Anggaran secara prioritas
2. Standart Sasaran Anggaran
3. Kinerja Anggaran

Perwujudan Nilai Transparasi (X2)

Transparansi adalah keterbukaan pemerintah kepada publik tentang semua informasi yang berkaitan dengan kegiatan administrasi pemerintah. Menurut (Andrianto 2007: 21) Untuk mewujudkan nilai transparansi publik dapat diukur melalui 2 indikator yaitu :

1. Kejelasan dan Kelengkapan Informasi publik
2. Keterbukaan Proses penyelenggaraan public

Pengendalian Akuntansi (X3)

Pengendalian akuntansi yaitu seperangkat kebijakan dan prosedur yang membatasi dan memandu kegiatan dalam pengelolaan keuangan guna untuk mencegah kesalahan dan tindakan kecurangan (Carter,2009:165). Indikator dalam variabel ini berisi tentang :

1. Ruang Lingkup Akuntansi
2. Sifat Informasi Akuntansi

Akuntabilitas (X4)

Akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah yaitu pertanggungjawaban terkait integritas keuangan, pengungkapan, dan ketaatan terhadap perundang-undangan. Menurut (Pasaribu, 2011). Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah meliputi laporan keuangan yang disusun dengan pendekatan akuntansi berbasis akrual dan disesuaikan dengan standar akuntansi pemerintahan. Indikator dalam variabel ini berisi tentang :

1. Akuntabilitas Kejujuran
2. Akuntabilitas Kebijakan
3. Akutabilitas Program
4. Akuntabilitas Hukum
5. Akuntabilitas Finansial

Value For Money (X5)

Menurut (Mardiasmo, 2009) *Value For Money* merupakan pengelolaan organisasi sektor publik berdasarkan pada tiga elemen utama yaitu ekonomis, efisien dan efektivitas. Indikator dalam variabel ini berisi tentang :

1. Ekonomis dalam mengelola prosedur administrasi
2. Efektifitas dalam melaksanakan program kerja
3. Efisien dalam pengelolaan anggaran

Pengelolaan Akuntansi Keuangan Sektor Publik (Y)

Pengelolaan akuntansi keuangan sektor publik terkait erat dengan peran akuntansi sebagai penyedia informasi keuangan untuk pihak eksternal organisasi. Pelaporan keuangan sektor publik adalah alat penting untuk menciptakan akuntabilitas publik. Indikator dalam variabel ini berisi tentang :

1. Standart akuntansi keuangan sektor publik
2. Sistem akuntansi keuangan sektor publik

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Analisis Data

Populasi berjumlah 53 pegawai tetapi yang sesuai dengan kriteria sebanyak 37 pegawai. Proses penyebaran kuesioner dilakukan secara langsung kepada pegawai sehingga peneliti berperan aktif dalam proses penyebaran kuesioner dilakukan.

Hasil Statistik Deskriptif

Tabel 1 Hasil Uji Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
KSA	37	4,00	5,00	4,6486	,48398
PNT	37	3,00	5,00	3,5135	,69208
PA	37	3,00	5,00	4,2703	,56019
Akuntabilitas	37	4,00	5,00	4,4865	,50671
VFM	37	4,00	5,00	4,7568	,43496
PAKSP	37	4,00	5,00	4,5405	,50523
Valid N (listwise)	37				

Sumber: Ouput SPSS, 2020

Kesimpulan dari hasil statistik deskriptif yaitu :

1. Kejelasan Sasaran Anggaran nilai terendah 4,00, nilai tertinggi 5,00, nilai rata-rata 4,6486 serta standar deviasi sebesar 0,48398.
2. Perwujudan Nilai Transparansi nilai terendah 3,00, nilai tertinggi 5,00, nilai rata-rata 3,5135 serta standar deviasi sebesar 0,69208.
3. Pengendalian Akuntansi nilai terendah 3,00, nilai tertinggi 5,00, nilai rata-rata 4,2703 serta standar deviasi sebesar 0,56019
4. Akuntabilitas nilai terendah 4,00, nilai tertinggi 5,00, nilai rata-rata 4,4865 serta standar deviasi sebesar 0,50671.
5. *Value For Money* nilai terendah 4,00, nilai tertinggi 5,00, nilai rata-rata 4,7568 serta standar deviasi sebesar 0,43496.
6. Pengelolaan Akuntansi Keuangan Sektor Publik nilai terendah 4,00, nilai tertinggi 5,00, nilai rata-rata 4,5405 serta standar deviasi sebesar 0,50523.

Hasil Uji Kualitas Data

a. Hasil Uji Validitas

Menyimpulkan bahwa 29 item pernyataan adalah valid. Tiap-tiap pernyataan memiliki nilai r hitung $>$ dari r tabel (0,3246) dan nilai sig. (2-tailed) $<$ 0,05.

b. Hasil Uji Reliabilitas

Menyimpulkan bahwa keenam variabel yaitu Kejelasan Sasaran Anggaran, Perwujudan Nilai Transparansi, Pengendalian Akuntansi, Akuntabilitas, *Value For Money* dan Pengelolaan Akuntansi Keuangan Sektor Publik dinyatakan reliabel. Tiap-tiap variabel memiliki nilai *Alpha Cronbach* di atas 0,6.

Hasil Uji Normalitas

Hasil uji *One Sample – Kolmogorov Smirnov* menunjukkan bahwa data penelitian ini berdistribusi normal. Besarnya nilai *Kolmogorov – Smirnov Z* yaitu 1,188 atau Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,119 $>$ tingkat signifikansi (α) 0,05.

Hasil Uji Asumsi Klasik

a. Hasil Uji Multikolinearitas

Hasil uji menunjukkan bahwa nilai VIF dan nilai *tolerance* pada variabel Kejelasan Sasaran Anggaran sebesar 1,011 dan 0,989, variabel Perwujudan Nilai Transparansi sebesar 1,058 dan 0,945, variabel Pengendalian Akuntansi sebesar 1,035 dan 0,967, variabel Akuntabilitas sebesar 1,079 dan 0,927, dan variabel *Value For Money* sebesar 1,002 dan 0,998. Disimpulkan tiap-tiap variabel independen memiliki nilai $VIF < 10$ serta $tolerance > 0,1$ artinya antar variabel independen tidak adanya masalah multikolinearitas.

b. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Hasil uji menunjukkan bahwa nilai signifikansi variabel Kejelasan Sasaran Anggaran, Perwujudan Nilai Transparansi, Pengendalian Akuntansi, Akuntabilitas, *Value For Money* lebih besar dari 0,05. Disimpulkan seluruh nilai signifikansinya $> 0,05$ berarti masing-masing variabel terbebas dari gejala heteroskedastisitas.

$$PAKSP = 0,840 + 0,243x_1 + 0,244x_2 + 0,139x_3 + 0,657x_4 + 0,157x_5 + e$$

Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 2 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,840	3,565		,236	,815
	KSA	,243	,079	,285	3,072	,004
	PNT	,244	,082	,283	2,982	,006
	PA	,139	,048	,273	2,909	,007
	Akuntabilitas	,657	,079	,798	8,326	,000
	VFM	,157	,075	,194	2,101	,044

Sumber: Output SPSS, 2020

$$PAKSP = 0,840 + 0,243x_1 + 0,244x_2 + 0,139x_3 + 0,657x_4 + 0,157x_5 + e$$

Hasil Uji Hipotesis

a. Uji Simultan

Tabel 3 Hasil Uji Simultan

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	51,001	5	10,200	17,283	,000(a)
	Residual	18,296	31	,590		
	Total	69,297	36			

Sumber: Output SPSS, 2020

Berdasarkan tabel di atas dilihat bahwa diperoleh nilai F_{hitung} (17,283) memiliki nilai signifikansi F sebesar 0,000 lebih kecil dari α (0,05), sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima. Artinya bahwa secara simultan, variabel independen yaitu X_1 (Kejelasan Sasaran Anggaran), X_2 (Perwujudan Nilai Transparansi), X_3 (Pengendalian Akuntansi), X_4 (Akuntabilitas), X_5 (*Value For Money*), berpengaruh terhadap variabel Y (Pengelolaan Akuntansi Keuangan Sektor Publik).

b. Uji Koefisien Determinasi

Table 4 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,858(a)	,736	,693	,76824

Sumber: Output SPSS, 2020

Berdasarkan tabel di atas besarnya *Adjusted R Square* 0,693 atau 69,3% variasi Pengelolaan Akuntansi Keuangan Sektor Publik dapat dijelaskan dengan variasi dari kelima variabel independen yaitu Kejelasan Sasaran Anggaran, Perwujudan Nilai Transparansi, Pengendalian Akuntansi, Akuntabilitas dan *Value For Money*. Sedangkan 30,7% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

a. Uji Parsial

Berdasarkan tabel 2 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Pengelolaan Akuntansi Keuangan Sektor Publik

Variabel X_1 (Kejelasan Senjangan Anggaran) “memiliki statistik uji t sebesar 3,072 dengan signifikansi t sebesar 0,004 lebih kecil dari α (0,05). Pengujian ini menunjukkan bahwa H_0 ditolak dan H_{1a} diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel X_1 (Kejelasan Senjangan Anggaran) berpengaruh positif terhadap variabel Pengelolaan Akuntansi Keuangan Sektor Publik. Hasil ini menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran mempunyai pengaruh terhadap *job-related attitudes* dan *budget related attitudes* dan juga pada kinerjanya. Reaksi tersebut adalah peningkatan kepuasan kinerja, penurunan ketegangan kerja, peningkatan sikap karyawan terhadap anggaran, kinerja anggaran dan efisiensi biaya pada pelaksanaan anggaran secara signifikan jika sasaran anggaran dinyatakan secara jelas. Hasil ini juga didukung oleh teori penetapan tujuan atau *goal setting theory*” yang menjelaskan tentang hubungan antara tujuan yang ditetapkan dengan prestasi kerja (kinerja). Sasaran dapat dipandang sebagai tujuan atau tingkat kinerja yang ingin dicapai oleh pegawai. Apabila pegawai berkomitmen untuk mencapai tujuannya, maka hal ini akan mempengaruhi tindakannya dan konsekuensi kinerjanya. Oleh karena itu maka

semakin tinggi sasaran anggaran yang dicapai maka semakin tinggi pula akuntabilitas kinerja yang dapat dicapai pada pengelolaan akuntansi keuangan sektor publik. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Zakiyudin (2015), Precelina (2016) dan Natalia, Kalangi, Warongan (2019) yang menyatakan bahwa Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh terhadap Pengelolaan Akuntansi Keuangan Sektor Publik.

2. Pengaruh Perwujudan Nilai Transparansi Terhadap Pengelolaan Akuntansi Keuangan Sektor Publik

Variabel X_2 (Perwujudan Nilai Transparansi) “memiliki statistik uji t sebesar 2,982 dengan signifikansi t sebesar 0,006 lebih kecil dari α (0,05). Pengujian ini menunjukkan bahwa H_0 ditolak dan H_{1b} diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel X_2 (Perwujudan Nilai Transparansi) berpengaruh positif terhadap variabel Pengelolaan Akuntansi Keuangan Sektor Publik. Hasil ini menunjukkan bahwa penyusunan laporan keuangan yang harus jujur, sebagai suatu bentuk kebutuhan transparansi yang merupakan syarat pendukung adanya akuntabilitas yang berupa keterbukaan (*openness*) pemerintah atas aktivitas pengelolaan sumber daya publik. Dengan adanya sistem yang terprogram langsung melalui IT maka hasil dari laporan keuangan terpercaya atau terintegrasi dapat mencegah kecurangan. Transparansi merupakan prinsip yang harus ada dan meliputi keseluruhan bagian pengelolaan keuangan baik dari proses perencanaan dan pelaksanaannya. Transparansi informasi terutama informasi keuangan dan fiskal harus dilakukan dalam bentuk yang relevan dan mudah dipahami untuk mencegah timbulnya penyimpangan tindakan aparatur publik. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat artinya, informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan, transparansi mengisyaratkan bahwa laporan keuangan tidak hanya dibuat tetapi juga terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat, karena aktivitas pemerintah adalah menjalankan amanat rakyat”. Dengan transparansi maka telah melakukan salah satu prinsip *good corporate governance*. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sayuti, Malik, dan Juardi (2018) yang menyatakan bahwa Perwujudan Nilai Transparansi berpengaruh terhadap Pengelolaan Akuntansi Keuangan Sektor Publik.

3. Pengaruh Pengendalian Akuntansi Terhadap Pengelolaan Akuntansi Keuangan Sektor Publik

Variabel X_3 (Pengendalian Akuntansi) “memiliki statistik uji t sebesar 2,909 dengan signifikansi F sebesar 0,007 lebih kecil dari α (0,05). Pengujian ini menunjukkan bahwa H_0 ditolak dan H_{1c} diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel X_3 (Pengendalian Akuntansi) berpengaruh positif terhadap variabel Pengelolaan Akuntansi Keuangan Sektor Publik. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin baik prosedur pengendalian akuntansi akan meningkatkan pengelolaan akuntansi keuangan sektor publik. Jika suatu instansi pemerintah memiliki sistem akuntansi yang handal maka diharapkan dengan praktik yang sehat membuat informasi akuntansi yang dihasilkan dapat membantu untuk meningkatkan kinerja instansi yang bersangkutan. Hal tersebut juga didukung oleh teori keagenan atau yang bisa disebut *agency theory* yang diungkapkan oleh Jensen & Meckling (1976) yang menyatakan bahwa hubungan keagenan dimana pihak pemegang saham (*principal*) melibatkan ataupun menyewa pihak lain yaitu manajemen (*agent*) untuk mengelola perusahaan dengan melibatkan pendelegasian wewenang pengambilan keputusan kepada agen. Oleh karena itu tentunya apabila masing-masing BKAD memiliki pengendalian akuntansi yang sangat baik, akan mendorong akuntabilitas yang semakin baik pula karena penggunaan sistem pengendalian akuntansi, yang memungkinkan kepada kepala BKAD membuat keputusan-keputusan yang lebih baik dan melakukan kontrol operasi-operasi dengan lebih efektif dan efisien. Apabila sistem pengendalian tidak berjalan dengan baik maka akan banyak terjadi penyelewengan atau *fraud* seperti biaya-biaya yang membengkak yang dapat menurunkan kinerja dari pihak BKAD Kota Malang sendiri yang dapat menimbulkan kualitas pelayanan dan pembangunan yang buruk bagi masyarakat di” Kota Malang. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Zakiyudin (2015), Precelina (2016) dan Natalia, Kalangi, Warongan (2019) yang menyatakan bahwa Pengendalian Akuntansi berpengaruh terhadap Pengelolaan Akuntansi Keuangan Sektor Publik

4. Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Pengelolaan Akuntansi Keuangan Sektor Publik

Variabel X_4 (Akuntabilitas) “memiliki statistik uji t sebesar 8,326 dengan signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari α (0,05). Pengujian ini menunjukkan bahwa H_0 ditolak dan H_{1d} diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel X_4 (Akuntabilitas) berpengaruh positif terhadap variabel Pengelolaan Akuntansi Keuangan Sektor Publik. Akuntabilitas publik keuangan daerah adalah pemberian informasi dan pengungkapan (*disclosure*) atas aktivitas dan kinerja keuangan daerah kepada semua pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) sehingga hak-hak publik, yaitu hak untuk tau (*right to know*), hak untuk”

diberi informasi (*right to be kept information*), dan hak untuk didengar aspirasinya (*right to be heard and to be listened to*) dapat terpenuhi. Unsur yang paling penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah adalah cara pengelolaan keuangan daerah secara berdaya guna dan berhasil guna. Hal tersebut diharapkan agar sesuai dengan aspirasi pembangunan dan tuntutan masyarakat yang semakin berkembang akhir-akhir ini. Hal tersebut sesuai dengan *Agency Theory* yang membahas kontrak antara principal dan agen. Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan bahwa terdapat perbedaan kepentingan antara prinsipal dan agen, sehingga agen tidak selamanya mengikuti keinginan prinsipal. Hubungan keagenan tersebut juga terjadi di pemerintahan antara pemerintah sebagai agen dan rakyat sebagai prinsipal. Pemerintah dapat melakukan kebijakan yang hanya mementingkan pemerintah dan penguasa dan mengorbankan kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Untuk mengurangi konflik maka diperlukan monitoring oleh prinsipal atas apa yang dilakukan oleh agen. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sayuti, Malik dan Juardi (2018) yang menyatakan bahwa Akuntabilitas berpengaruh terhadap Pengelolaan Akuntansi Keuangan Sektor Publik.

5. Pengaruh *Value For Money* Terhadap Pengelolaan Akuntansi Keuangan Sektor Publik

Variabel X_5 “(*Value For Money*) memiliki statistik uji t sebesar 2,101 dengan signifikansi sebesar 0,044 lebih kecil dari α (0,05). Pengujian ini menunjukkan bahwa H_0 ditolak dan H_{1e} diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel X_5 (*Value For Money*) berpengaruh positif terhadap variabel Pengelolaan Akuntansi Keuangan Sektor Publik. Hasil ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan *value for money* yaitu: ekonomis (hemat cermat) dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisiensi (berdaya guna) dalam penggunaan sumber daya dalam arti penggunaannya diminimalkan dan hasilnya dimaksimalkan (*maximizing benefits and minimizing costs*), serta efektif (berhasil guna) dalam arti mencapai tujuan dan sasaran. Hal ini mengindikasikan bahwa dalam pengukuran kinerja mampu menekan biaya dan mendapatkan hasil yang berkualitas dalam proses penganggaran secara ekonomi, efisien, dan efektivitas. Kegiatan yang dilaksanakan dan kemahiran pegawai dalam menjalankan tugas dan fungsinya meningkatkan kinerjanya. Hasil yang diperoleh dari kegiatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat secara nyata langsung dirasakan manfaatnya dari program kerjanya. Sebagai organisasi publik yang segala kegiatannya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan tidak berorientasi pada laba melainkan memanfaatkan dana sebaik mungkin.” Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh sayuti, malik, juardi (2018) yang

menyatakan bahwa *Value For Money* berpengaruh terhadap Pengelolaan Akuntansi Keuangan Sektor Publik.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil pengujian secara simultan kejelasan sasaran anggaran, perwujudan nilai transparansi, pengendalian akuntansi, akuntabilitas dan *value for money* berpengaruh terhadap pengelolaan akuntansi keuangan sektor publik.
2. Berdasarkan hasil pengujian secara parsial kejelasan sasaran anggaran, perwujudan nilai transparansi, pengendalian akuntansi, akuntabilitas dan *value for money* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan akuntansi keuangan sektor publik.

Keterbatasan

Penelitian ini dilakukan dengan beberapa keterbatasan diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Penelitian hanya menggunakan kuesioner dalam pengambilan jawaban dari responden.
2. Responden dalam penelitian terbatas karena adanya covid-19 yang menyebabkan peneliti kesusahan dalam mengumpulkan datanya.

Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil analisis data yang dilakukan ada beberapa saran yaitu:

1. Untuk peneliti selanjutnya disarankan menerapkan metode survei melalui kuesioner dengan penambahan teknik wawancara langsung, agar data responden akan lebih menggambarkan kondisi sebenarnya.
2. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan menambah sampel sehingga hasil penelitian bisa lebih luas lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Aldridge, John. E, dan Siswanto Sutojo.2005. *Good Corporate Governance*. Jakarta: PT. Damar Mulia Pustaka.
- Antony, R N dan Goviderajen 2005. *Sistem Pengendalian Manajemen Jilid 2*. Jakarta Salemba Empat.
- Andrianto, Nico. 2007. *Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui e-Government*. Malang: Banyumedia Publishing.
- Abdul Halim. 2002. *Akuntansi Sektor Publik akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi pertama. Jakarta: Salemba Empat.
- Bastian, Indra. 2001. *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia*. Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE.
- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.

- Bastian, Indra. 2010. *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar Edisi Ketiga*. Penerbit Erlangga :Jakarta
- Carter.K William. 2009. *Akuntansi Biaya*. Buku 1. Edisi Keempat Belas, Jakarta: Salemba Empat.
- Harun. 2009. *Reformasi Akuntansi Dan Manajemen Sektor Publik Di Indonesia*. Jakarta: Salemba empat.
- Jensen, M.C. and W.H. Meckling. 1976. "Theory of the firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership structure." *Journal of Financial Economics* 3, 305-360.
- Lembaga Administrasi Negara. *Penyusunan Standar Pelayanan Publik*. LAN, 2003.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi. Yogyakarta
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen keuangan daerah*. Penerbit Andi.
- Mardiasmo, 2006. "Pewujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik" Suatu Sarana Good Governance, *Jurnal Akuntansi Pemerintah* vol. 2, no. 1, mei 2006 hal 1 – 17.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Mustofa. 2012. *Pengaruh Penyajian dan Aksebilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten Pematang Jaya*. ISSN.
- Pasaribu. FJ. 2011 *Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan SKPD Dan Aksebilitas Laporan Keuangan SKPD Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan SKPD*. Tesis. Medan. Program Pasca Sarjana Univ. Sumatera Utara.
- Putra, Deki. 2013. "Pengaruh Akuntabilitas Publik Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Padang)" Universitas Negeri Padang. *E-journal* 1(1).
- Ramandei, Pilipus. 2009. "Pengaruh Karakteristik Sasaran Anggaran dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kinerja Manajerial Aparat Pemerintah Daerah Kota Jayapura". (Thesis)
- Sanjaya, Sujana dan Ni Luh Gede Erni Sulindawati. 2014. *Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah Dan Aksebilitas Terhadap Penggunaan Informasi Keuangan Daerah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng)*. *E-journal* 2(1) Hal. 1-12.
- Zakiyudin, Ali dan Suyanto 2015. "Kejelasan Sasaran anggaran , Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hulu)" Pekanbaru: Universitas Riau.
- *) Niken Ayu Saskia adalah Alumni Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang.
- **) Moh. Amin adalah Dosen tetap Universitas Islam Malang.
- ***) Junaidi adalah Dosen tetap Universitas Islam Malang.